



**TINDAK LANJUT**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**TRIWULAN I TAHUN 2017**  
**DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- g. Hasil Monev SOP Triwulan I Dittipidkor Bareskrim Polri

**2. PELAKSANAAN**

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi Triwulan I terhadap SOP yang telah ada yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap SOP yang baru dibuat, agar dipahami dan dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini juga dapat dijadikan pedoman bagi setiap personel dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap SOP yang baru saja di reviu yaitu terhadap SOP Pengaduan Masyarakat, apakah sesuai dengan

yang diharapkan atau dalam penerapannya personel masih menemukan kendala.

- c. Membuat/menyusun inovasi SOP lain yang dianggap perlu/dibutuhkan bagi setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri
- d. Berkoordinasi dengan Biro Renmin Bagbinfung Bareskrim Polri dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

Pada penanganan pengaduan Masyarakat ini memang cukup kompleks, dimana dari segi SDM dan anggaran belum terakomodir, begitu juga dengan sarana prasarananya yaitu ruang penerimaan pengaduan masyarakat serta ATK nya masih melekat/menggunakan pada kegiatan Lidik Sidik TPK.

### 3. KESIMPULAN

Tindak Lanjut terhadap hasil Monev SOP ini harus dilaksanakan segera mungkin agar personel dapat segera memperoleh pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap SOP Triwulan I ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 31 Maret 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
DIREKTUR  
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

